



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LAPORAN KINERJA 2019



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat Informasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam menyelenggarakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016 – 2021 yang memberikan informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (Lima) Tahun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat *outcomes*, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2019.

Secara umum kinerja Tahun 2019 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja, keuangan dan pengawasan.



Akhirnya tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja daerah, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi kriteria penilaian sehingga maksud dan tujuan sesungguhnya tercapai dan bermanfaat bagi semua *stakeholders*. Kami mengharapkan adanya pemberian saran dan kritik untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Kuala Tungkal, April 2020

Bupati Tanjung Jabung Barat,



Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	IV
IKHTISAR EKSKLUSIF	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1
1.2.1 Letak Wilayah Geografi	1
1.2.2 Luas Wilayah	2
1.2.3 Topografi	3
1.2.4 Karakteristik Wilayah	4
1.2.5 Perekonomian dan Sosial Budaya.....	5
1.2.6 Keuangan Daerah (Anggaran).....	5
1.3 Kelembagaan dan Personil	6
1.3.1 Kelembagaan	6
1.3.2 Aparatur Pemerintah Daerah	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah.....	14
3.2 Analisa dan Evaluasi Kinerja	15
3.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP.....	30



DAFTAR TABEL

	Hal
1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	vi
2. Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran	13
3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	14
4. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019	15
5. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019	17
6. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2019	19
7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019	20
8. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2019	22
9. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2019	25
10. Jumlah dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan)	27



IKHTISAR EKSKLUSIF

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selama penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2019, sebagai tolak ukur peningkatan kinerja kedepan pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana program – program yang telah disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, tentunya sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dilaksanakan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang memuat sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai. Dimana dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional dan mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan, hambatan - hambatan / kendala yang ditemui dalam pelaksanaan serta mengungkapkan juga strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Proses penilaian kinerja yang terukur dan bersifat *outcomes* menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran yang diemban. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun ke - IV RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2016 – 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel.

Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis.

Beberapa hal pokok yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini terhadap 6 (enam) sasaran srategis dan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Penyusunan perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada



Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016- 2021 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi yang akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapainya dalam Tahun 2019.

B. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 dapat dihitung secara terukur antara Target dan Realisasinya, hali ini terlihat dari pengukuran capaian indikator kinerja utama pada setiap indikator pada 6 (Enam) Kinerja utama yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada kolom capaian kinerja dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pelayanan umum dan kualitas permukiman	Indeks infrastruktur	73,27 %	59,99
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	67,84	67,54
3	Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,07	66,20
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per kapita / tahun	9.650.000	9.656.500
5	Meningkatnya kualitas tatanan kehidupan bermasyarakat	Tidak terjadi konflik antar umat beragama atau suku (<i>Zero Conflict</i>)	0	0
6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	55,75	44,65



2. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja dari 6 (Enam) sasaran strategis yang dilihat dari indikator kerjanya masing-masing.

SS1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pelayanan umum dan kualitas permukiman

Capaian pada sasaran strategis pertama yaitu dengan indikator kinerja utama adalah indeks infrastuktur dimana pada Tahun 2019 diperoleh capaian kinerja adalah 81,87% dengan target 73,27 % dan realisasi sebesar 59,99.

Dalam Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur terdapat beberapa komponen untuk mengetahui hasil capaian dan target tahun 2019 baik dari akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik dan akses jaringan telekomunikasi Sub Bidang Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Barat indikatornya adalah Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi.

SS 2 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat

Capaian pada sasaran strategis kedua yaitu dengan indikator kinerja utama adalah indeks pembangunan manusia dimana pada Tahun 2019 diperoleh capaian kinerja adalah 99,55% dengan target 67,84 % dan realisasi sebesar 67,54.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2017 – 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2017 pencapaian IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 66,15 meningkat sebesar 0,98 menjadi 67,13 pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan meningkat lagi dengan rata – rata peningkatan menjadi 0,41.

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk dari 3 faktor yaitu :

1. Faktor Kesehatan yang dilihat dari variabel Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Faktor Pendidikan yang dilihat dari variabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
3. Faktor Standar Hidup Layak / Ekonomi yang dilihat dari variabel Pengeluaran Perkapita



SS 3 Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup

Capaian pada sasaran strategis ketiga yaitu dengan indikator kinerja utama adalah indeks kualitas lingkungan hidup dimana pada Tahun 2019 diperoleh capaian kinerja adalah 100% dengan target 65,07 % dan realisasi sebesar 66,20.

IKLH yang untuk Tahun 2019 ini sudah mencapai target. Realisasi tahun 2019 yakni 66,20. Komponennya meliputi Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

Untuk capaian IKLH Tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 yakni 100%. Namun untuk titik sampling yang diambil pada Tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan Tahun 2018 sehingga angka indeks yang didapatkan tidak dapat mewakili kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2019 adalah kurangnya titik sampel air dan udara yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Selain itu indeks tutupan lahan masih menggunakan perhitungan tahun 2016 yang dilakukan oleh DLH Provinsi.

Agar nilai Indeks yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya maka diperlukan tambahan titik sampling pengukuran Udara dan Air. Selain itu diperlukan juga pengukuran Indeks Tutupan Lahan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

SS 4 Meningkatnya pendapatan masyarakat

Capaian pada sasaran strategis keempat yaitu dengan indikator kinerja utama adalah pengeluaran perkapita / tahun dimana pada Tahun 2019 diperoleh capaian kinerja adalah 100% dengan target 9.650.000 dan realisasi sebesar 9.656.500.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diterangkan bahwa pada Tahun 2019 konsumsi makanan lebih besar dari konsumsi non makanan, hal ini sesuai dengan pada umumnya bahwa di negara berkembang, pengeluaran untuk



makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Capaian pengeluaran perkapita pelaku usaha perikanan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 46,09% atau sebesar 9.656.500 dari 4.852.567 pada Tahun 2018, kenaikan pengeluaran perkapita pada Tahun 2019 ini dimungkinkan dikarenakan terjadinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum, selain itu bantuan pemerintah melalui Dinas Perikanan bisa juga memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha perikanan.

Permasalahan dalam penghitungan pengeluaran perkapita masyarakat pelaku usaha perikanan adalah :

- a. Responden yang dijadikan sample sering lupa berapa pengeluaran ril yang dikeluarkan dalam sebulan.
- b. Masih kurangnya jumlah pendata.
- c. Isu privasi yang muncul pada masyarakat, sehingga responden tidak selalu terbuka dengan yang ditanyakan pendata.

Solusi dan saran bagi pendata, pendata harus pandai dalam mengolah pertanyaan kepada responden dan bagi responden, sebisa mungkin untuk menghilangkan isu privasi, dikarenakan pendataan ini sangat penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran.

SS 5 Meningkatnya kualitas tatanan kehidupan bermasyarakat

Capaian pada sasaran strategis kelima yaitu dengan indikator kinerja utama adalah tidak terjadi konflik antar umat beragama atau suku (*Zero Conflict*) dimana pada Tahun 2019 target, realisasi dan capaian kinerja 0%, dimana menunjukkan adanya capaian persentase penurunan pelanggaran perda dan penyakit masyarakat sebesar 67%, Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi dan Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis sebesar 95% serta Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan Siaga Lingkungan sebesar 85% sehingga tidak terjadi konflik ditengah masyarakat.

Permasalahan dan Solusi :

- a. Banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban dengan datang dan mengadu nasib dengan berbagai kegiatan seperti Berdagang



- dan Buruh Harian Lepas dan lain sebagainya yang meresahkan ketertiban dan kenyamanan di masyarakat sehingga berbagai persoalan muncul seperti timbulnya penyakit masyarakat (Pekat).
- b. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum tetap menjadi kendala pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat karena masyarakat sering tidak mau tahu atau tidak peduli dengan tugas-tugas yang diemban Polisi Pamong Praja.
 - c. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi, mengundang masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya, namun hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dilakukan diluar-luar aturan yang telah ada misalnya seorang pelajar memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar.
 - d. Banyak bermunculan pedagang - pedagang kaki lima dan mereka memanfaatkan fasilitas - fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum itu sendiri.
 - e. Terdapatnya masyarakat dan anak-anak yang sudah putus sekolah memanfaatkan waktu sehari-hari dengan cara penyalahgunaan obat berupa Lem.
 - f. Banyak bermunculan anak-anak funk.

Alternatif pemecahan masalah, Adapun strategis pemecahan masalah untuk dilaksanakan selama 5 tahun dan untuk kedepannya adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan khususnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti sekalipun dirasakan belum optimal dalam rangka pencapaian kinerja terhadap indikator kelima dari sasaran strategis yakni tidak terjadinya konflik antar umat beragama atau suku sehingga menjadi *Zero Conflict*. Hambatan dan Permasalahan tersebut dikarenakan Besaran dan Struktur Organisasi



dengan beban tugas yang besar belum didukung dengan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

SS 6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Capaian pada sasaran strategis keenam yaitu dengan indikator kinerja utama adalah indeks reformasi birokrasi dimana pada Tahun 2019 capaian kinerja yang dicapai sebesar 80,08% dengan target 55,75 dan realisasi 44,65. Capaian Terhadap Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,08% dari target yang ingin dicapai sudah menunjukkan capaian yang sangat maksimal, dimana penilaian mandiri reformasi birokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini merupakan tahun pertama pelaporan pada periode RPJMD 2016-2021, hanya sedikit kendala yang ditemui yaitu masih ada OPD yang belum memenuhi data sesuai dengan komponen penilaian.

3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) sasaran strategis dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki seperti aparatur, sarana prasarana dan anggaran. Tahun 2019 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1.851.596.854.087,00 yang digunakan, untuk jumlah Anggaran Belanja Daerah sebesar dengan rincian :

- a. Belanja tidak langsung sebesar **Rp.737.944.990.917,00** (90,85%)
- b. Belanja langsung sebesar **Rp.1.113.651.863.170,00** (96,38%)

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja OPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.



BAB I PENDAHULUAN

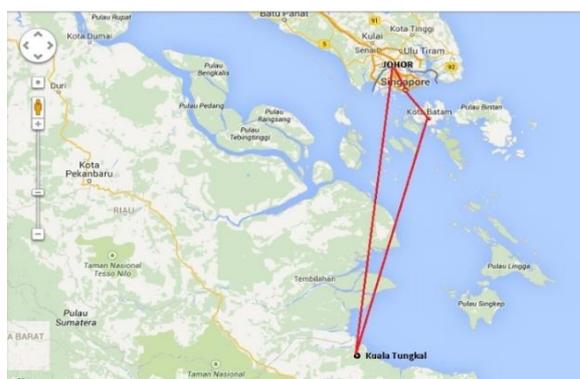
1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Jambi yang beribukota Kuala Tungkal, berdiri pada tanggal **10 Agustus 1965** yang dikukuhkan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965), dengan nama Kabupaten Tanjung Jabung. Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi Daerah (Otonomi Daerah), daerah diberi wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiridan Kabupaten Tanjung Jabung saat itu memiliki wilayah yang sangat luas, dengan jangkauan Kecamatan cukup jauh dari Ibukota Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung melakukan Pemekaran Kabupaten bersamaan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jambi. Sejak *Tanggal 4 Oktober 1999* Kabupaten Tanjung Jabung resmi di mekarkan berdasarkan *Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999* tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada posisi sangat strategis dalam perekonomian regional karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle (IMS-GT) dan akan diperkuat dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2016, semakin menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura.

1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.2.1 Letak Wilayah Geografi



Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53' – 01°41' Lintang Selatan dan antara 103°23' – 104°31' Bujur Timur, dibagian Timur Provinsi Jambi, dialiri Sungai Pengabuan dari hulu hingga ke hilir yang bermuara dan berbatas dengan Laut Cina Selatan,



dengan menggunakan transportasi laut dapat menuju ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Negara Singapura. Dimana jarak kota Kuala Tungkal ke Singapura \pm 90 mil dengan waktu tempuh 3.20 jam, dengan daratan seluas 4.868,08 Km² dan perairan 141,75 Km² dengan batas-batas yaitu sebelah :

- Utara : Laut China Selatan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Selatan : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.
- Barat : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo.
- Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2.2 Luas Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.375,16 Km² atau \pm 9,38% dari luas Provinsi Jambi, Kab.Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53' – 01°41' Lintang Selatan dan antara 103°23' – 104°21' Bujur Timur, dan dibagi dalam 13 Kecamatan dan 20 Kelurahan :

1. Kecamatan Tungkal Ilir
 - Kelurahan Tungkal II
 - Kelurahan Tungkal III
 - Kelurahan Tungkal IV Kota
 - Kelurahan Patunas
 - Kelurahan Sriwijaya
 - Kelurahan Kampung Nelayan
 - Kelurahan Tungkal Harapan
 - Kelurahan Sungai Nibung
2. Kecamatan Tungkal Ulu
 - Kelurahan Pelabuhan Dagang
3. Kecamatan Batang Asam
 - Kelurahan Dusun Kebun
4. Kecamatan Betara
 - Kelurahan Mekar Jaya
5. Kecamatan Bram Itam
 - Kelurahan Bram Itam Kiri
6. Kecamatan Kuala Betara
 - Kelurahan Betara Kiri
7. Kecamatan Merlung
 - Kelurahan Merlung



8. Kecamatan Muara Papalik
 - Kelurahan Rantau Badak
9. Kecamatan Pengabuan
 - Kelurahan Teluk Nilau
10. Kecamatan Renah Mendaluh
 - Kelurahan Lubuk Kambing
11. Kecamatan Seberang Kota
 - Kelurahan Tungkal V
12. Kecamatan Senyerang
 - Kelurahan Senyerang
13. Kecamatan Tebing Tinggi
 - Kelurahan Tebing Tinggi

1.2.3 Topografi

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara Topografi alamnya berbentuk dataran tinggi dan sebahagian lagi merupakan dataran rendah, dimana tekstur tanahnya adalah sebagian tanah berlumpur karena dekat dengan laut dan sebagian lagi tanah kering, kemudian beriklim tropis basah dengan variasi kecil tergantung kelembaban nisbi, dataran tinggi temperatur max 27° C, dataran rendah temperatur 32° , Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kab. Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar $29,9^{\circ}$ C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau



daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya.

1.2.4 Karakteristik Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu : a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.



Sebagai Daerah yang terkenal dengan makanan lautnya “Sea Food” karena ujung daerahnya sangat berdekatan dengan laut dan berdekatan dengan jalur SIJORI (Singapura, Johor, Riau), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berpotensi sebagai Daerah Pelabuhan, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak di bangun Pelabuhan mulai dari pelabuhan lokal sampai dengan pelabuhan Internasional seperti pelabuhan Roro. Disamping itu pada daerah bahagian daratnya terhampar tanah perkebunan yang sangat luas.



1.2.5 Perekonomian dan Sosial Budaya

Perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada bidang – bidang tertentu seperti perekonomian, dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk sarana dan prasarana, antara lain terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang relatif masih rendah sehingga berdampak pada produktivitas kerja serta masih tingginya kesenjangan ekonomi yang diindikasikan dari angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta angka gini rasio yang relatif masih tinggi serta iklim investasi yang masih perlu dioptimalkan. Pada bidang Sosial Budaya yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat beragam karena penduduk yang berdomisilli dari bermacam suku seperti suku Jawa, Melayu, Bugis, Banjar, Padang, Batak, dan penduduk asli Jambi. Sebagian besar berbudaya melayu dan banjar yang berjalan secara Islami, karena di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mayoritas penduduknya beragama Islam.

1.2.6 Keuangan Daerah (Anggaran)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Tahun 2019 memperoleh dan menggunakan Anggarannya secara Profesional, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang



Undanguan yang berlaku. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan program – program sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sebesar **Rp.1.585.168.059.617,00-** dengan rincian pendapatan sebagai berikut :
 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 104.235.746.885,00-
 2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.260.205.174.228,00-
 3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 220.727.138.504,00-
- b. Anggaran Belanja 2019 sebesar **Rp.1.851.596.854.087,00-** yang terdiri dari:
 1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 737.944.990.917,00-
 2. Belanja langsung sebesar Rp. 1.113.651.863.170,00-

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota serta belanja tidak terduga. belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam APBD yang ditetapkan setiap tahunnya.

1.3. KELEMBAGAAN DAN PERSONIL

1.3.1 Kelembagaan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah telah dibentuk pula Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2018, dengan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah : Tipe A
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Tipe B
3. Inspektorat Kabupaten : Tipe A
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Tipe A
5. Dinas Kesehatan : Tipe A
6. Dinas Lingkungan Hidup : Tipe A
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Tipe A
8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura : Tipe A
9. Dinas Perkebunan dan Peternakan : Tipe A
10. Dinas Komunikasi dan Informatika : Tipe A
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Tipe A
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan : Tipe A
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Tipe B
14. Dinas Ketahanan Pangan : Tipe B
15. Dinas Penanaman Modal dan PTSP : Tipe B
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Tipe B
17. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah : Tipe B
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : Tipe C
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman : Tipe C
20. Dinas Sosial : Tipe C
21. Dinas Tenaga Kerja : Tipe C
22. Dinas Perhubungan : Tipe C
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Tipe C
24. Dinas Perikanan : Tipe C
25. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga : Tipe C
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Tipe A
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah : Tipe A
28. Badan Pendapatan Daerah : Tipe A
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMDaerah : Tipe B
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : Tipe B



31. Badan Penanggulangan Bencana	: Tipe C
32. Kecamatan Tungkal Ilir	: Tipe A
33. Kecamatan Tungkal Ulu	: Tipe A
34. Kecamatan Batang Asam	: Tipe A
35. Kecamatan Betara	: Tipe A
36. Kecamatan Bram Itam	: Tipe A
37. Kecamatan Kuala Betara	: Tipe A
38. Kecamatan Merlung	: Tipe A
39. Kecamatan Muara Papalik	: Tipe A
40. Kecamatan Pengabuan	: Tipe A
41. Kecamatan Renah Mendaluh	: Tipe A
42. Kecamatan Seberang Kota	: Tipe A
43. Kecamatan Senyerang	: Tipe A
44. Kecamatan Tebing Tinggi	: Tipe A

1.3.2 Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2019 berjumlah 4045 orang.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip - prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai - nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja inidapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran



kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah.

Cara-cara pengukuran yang tepat akansangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat. Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan - perubahan di beberapa segmen atau sub sistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem AKIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dari penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 yang memiliki tujuan esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan, dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh.



Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud AKIP. AKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja masa datang.

Dalam AKIP ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2019. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupten Tanjung Jabung Barat menyesuaikan dengan metode penulisan yang disajikan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagian Sampul dan Pengantar berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan ringkasan eksekutif.
- Bab I Pendahuluan berisi latar Belakang yang menyajikan isu strategis, kelembagaan dan sumber daya aparatur yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggaran dan sitematika pelaporan.
- Bab II Perencanaan Kinerja menyajikan ringkasan rencana stratetgis dan rencana kinerja / perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Realisasi Anggaran.
- Bab IV Penutup berisi simpulan kinerja Tahun 2019 dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016 – 2021 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode Tahun 2016 - 2021. Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode Tahun 2016 – 2021.

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas**” yang dideskripsikan sebagai berikut:

- ❖ **MAJU** berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.
- ❖ **ADIL** berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya *pemerataan* pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
- ❖ **MAKMUR** berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
- ❖ **BERMARTABAT** berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.
- ❖ **BERKUALITAS** berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tercapainya Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.



4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Selanjutnya, dalam rangka menjabarkan Visi, Misi, serta Tujuan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode satu tahun, maka perlu dituangkan kedalam suatu sistem perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian kinerja dini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program - program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016-



2021 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi yang akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapainya dalam Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja. Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Tabel 2. Penjabaran Misi, Tujuan Dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD 2021
MISI I	TUJUAN 1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pelayanan umum dan kualitas permukiman	Indeks Infrastruktur	83,62%
MISI II	TUJUAN 1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	68,81
	TUJUAN 2	Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,59
MISI III	TUJUAN 1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per kapita / Tahun	Rp. 10.250.000
MISI IV	TUJUAN 1	Meningkatnya kualitas tatanan kehidupan bermasyarakat	Tidak terjadi konflik antar umat beragama atau suku (<i>Zero conflict</i>)	0
MISI IV	TUJUAN 2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	61,50



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 dapat dihitung secara terukur antara Target dan Realisasinya, hal ini terlihat dari pengukuran Capaian indikator kinerja utama pada setiap indikator pada 6 (Enam) Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada kolom capaian kinerja dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pelayanan umum dan kualitas permukiman	Indeks Infrastruktur	73,27 %	59,99%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	67,84	67,54
3	Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,07	66,20
4	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengeluaran Per kapita / tahun	Rp.9.650.000	Rp.9.656.500
5	Meningkatnya kualitas tatanan kehidupan bermasyarakat	Tidak terjadi konflik antar umat beragama atau suku (Zero Conflict)	0	0
6	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	55,75	44,65

3.2 ANALISA DAN EVALUASI KINERJA

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja dari 6 (Enam) sasaran strategis yang dilihat dari indikator kinerjanya masing-masing.

SS 1 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Dasar Pelayanan Umum Dan Kualitas Permukiman



Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pelayanan umum dan kualitas permukiman. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021
		2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Infrastruktur	-	-	73,27%	59,99%	81,87%	83,62%
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber : Dinas PUPR, PERKIM, LH, KOMINFO

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan pun di rancang dan di laksanakan secara berkala dari tahun ke tahun baik pelayanan kebutuhan yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur yang terintergrasi dengan aspek perekonomian berbasis kerakyatan.

Dalam Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur terdapat beberapa komponen untuk mengetahui hasil capaian dan target Tahun 2019 baik dari akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik dan akses jaringan telekomunikasi. Sub Bidang Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Barat indikatornya adalah Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi.



Untuk SPAM Jaringan perpipaan dilakukan oleh PDAM hingga saat ini jumlah sambungan rumah sebanyak 8.400 Sambungan Rumah yang mampu melayani 33.600 penduduk. Terkait dengan kemampuan kapasitas produksi sebesar 400 liter/detik yang seharusnya mampu untuk melayani 32.000 sambungan rumah artinya untuk cakupan layanan kita masih memiliki idle kapasitas yang cukup besar. Sementara itu pemenuhan kebutuhan Air Minum lainnya bersumber dari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dari beberapa sumber antara lain :

- a. Sumur Gali 341 Unit melayani 2.432 Rumah
- b. Sumur Bor Unit melayani 11.659 Rumah
- c. Perlindungan Mata Air 3 unit melayani 90 Rumah
- d. Penampungan Air Hujan 466 Unit melayani 8.691 Rumah
- e. Perpipaan Non PDAM 116 Unit melayani 11.277 Rumah

Terkait air limbah secara khusus pendataan belum dilakukan dengan baik, dalam perhitungan SPM air limbah ini kami menggunakan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- a. Pelayanan Air Limbah menggunakan Cubluk sebanyak 4.947 Unit
- b. Pelayanan Air Limbah dengan leher angsa 40.070 Unit
- c. Pelayanan Air Limbah Plengsengan sebanyak 6.220 Unit
- d. Pelayanan dengan Komunal sebanyak 115 Unit

Pada akses jaringan telekomunikasi telah dibangun portal Perangkat Daerah (Website PD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semua OPD telah terkoneksi. Jaringan Internet melalui Diskominfo Kab.Tanjab Barat, serta telah dibangun Menara Telekomunikasi Per Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Kecamatan Bram Itam 7 Menara Tower Telekomunikasi
2. Kecamatan Pengabuan 6 Menara Tower Telekomunikasi
3. Kecamatan Senyerang 4 Menara Tower Telekomunikasi
4. Kecamatan Betara 12 Menara Tower Telekomunikasi
5. Kecamatan Kuala Betara 1 Menara Tower Telekomunikasi
6. Kecamatan Tebing Tinggi 19 Menara Tower Telekomunikasi
7. Kecamatan Tungkal Ulu 10 Menara Tower Telekomunikasi
8. Kecamatan Muara Papalik 11 Menara Tower Telekomunikasi
9. Kecamatan Merlung 6 Menara Tower Telekomunikasi
10. Kecamatan Renah Mendaluh 4 Menara Tower Telekomunikasi
11. Kecamatan Batang Asam 14 Menara Tower Telekomunikasi
12. Kecamatan Tungkal Ilir 20 Menara Tower Telekomunikasi

Dalam Akses Listrik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 Kecamatan dengan 134 Desa / Kelurahan merupakan Kabupaten yang memiliki Ratio Elektrifikasi (RE) paling rendah di Provinsi Jambi. Pada Tahun 2019 Ratio Elektrifikasi (RE) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 77,39% dengan jumlah pelanggan rumah tangga PLN sebesar 62.531.

Untuk realisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018 terhadap target yang ingin dicapai Indeks Infrastuktur belum dapat dilihat karena penghitungan Indeks Kualitas Infrastuktur baru ditetapkan Tahun 2019, yang mana khusus untuk komponen akses air bersih di Tahun sebelumnya hanya melakukan penghitungan persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih.

SS 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat



Pada sasaran ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat, mempunyai 1 (satu) Indikator Utama dengan Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021
		2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,15	67,13	67,84	67,54	99,55%	68,81
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber : Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan data BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2017 – 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2017 pencapaian IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 66,15 meningkat sebesar 0,98 menjadi 67,13 pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 juga meningkat dengan rata – rata peningkatan menjadi 0,41.

IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk dari 3 faktor yaitu :

1. Faktor Kesehatan yang dilihat dari variable Angka Harapan Hidup (AHH).
2. Faktor Pendidikan yang dilihat dari variabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).
3. Faktor Standar Hidup Layak / Ekonomi yang dilihat dari variabel Pengeluaran Perkapita.



Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan yang sudah dilakukan berdampak positif terhadap meningkatnya kualitas hidup sebahagian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup setiap tahunnya dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yaitu dari 67,75 di Tahun 2017 menjadi 67,95 di Tahun 2019.

Aksi program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP), pelayanan pemeriksaan ibu hamil secara berkala, pelayanan pasca persalinan / kelahiran, pelayanan emergensi kebidanan dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI). Menetapkan standar puskesmas dengan minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yaitu dokter / dokter layanan primer, dokter gigi, perawata, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medic, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Mengadakan program Ploraris bagi masyarakat lansia berbentuk kegiatan senam dan pemeriksaan rutin bagi masyarakat usia 60 ke atas.

Mendirikan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa dan kelurahan guna melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) secara terpadu, rutin dan periodik.

Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Peningkatan angka harapan lama sekolah setiap tahunnya dari 12,27 pada Tahun 2017 menjadi 14,37 pada Tahun 2019 didukung dari peningkatan akses pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah dan sekolah tingkat atas terutama yang ada di desa diantaranya berupa pendirian unit sekolah baru (USB) dan sekolah jauh bagi masyarakat dengan jarak akses menuju sekolah diatas 3 km, menggiatkan program pemberantasan buta aksara melalui program penyeteraan kejar paket a, b, dan c.

Standar Hidup Layak Ekonomi

Peningatan standar kualitas hidup layak ekonomi ditunjukkan dengan variabel pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp. 9.004.000 per orang pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 9.715.000 dengan rata – rata Rp. 330.000 peningkatan ini didukung dari program penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

Dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar pada Infrastruktur penunjang akses kegiatan perekonomian masyarakat seperti jalan akses menuju usaha tani kemudian usaha perikanan memperbanyak kuota pelatihan bagi masyarakat dengan usia produktif.

SS 3

Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Hidup



Pada Sasaran Strategis berikut adalah mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Berikut tabel realisasi capaian dibawah ini :

Tabel 6.Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2019

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021
		2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	65,07	66,20	100%	65,59

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, PUPR

IKLH yang untuk tahun 2019 ini sudah mencapai target. Realisasi Tahun 2019 yakni 66,20. Komponennya meliputi Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

$$IKLH\ 2019 = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times ITH) = 66,20$$

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

- Parameter perhitungan IKA meliputi 7 parameter, untuk Tahun 2019 Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil perhitungan IKA 61,429.
- Titik sampling yang diambil untuk Tahun 2019 lebih sedikit daripada Tahun 2018 sehingga tidak mewakili kondisi yang sebenarnya.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Indeks Kualitas Udara pada tahun 2019 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil 90,12 (kualitas Baik).

3) Indeks Tutupan Lahan (ITH)

- Perhitungan Tutupan Lahan pernah dilakukan Pemerintahan Provinsi pada Tahun 2016, namun untuk Kab. Tanjung Jabung Barat sendiri masih belum pernah melakukan perhitungan sendiri. Hingga saat ini belum ada data terbaru terkait tutupan lahan dan masih menggunakan data lama Tahun 2016 yakni 52,09.

Untuk capaian IKLH Tahun 2019 yakni 100%. Namun untuk titik sampling yang diambil pada Tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan Tahun 2018 sehingga angka indeks yang didapatkan tidak dapat mewakili kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2019 adalah kurangnya titik sampel air dan udara yang digunakan untuk melakukan perhitungan, selain itu indeks tutupan lahan masih menggunakan perhitungan Tahun 2016 yang dilakukan oleh DLH Provinsi.

Agar nilai Indeks yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya maka diperlukan tambahan titik sampling pengukuran Udara dan Air. Selain itu diperlukan juga pengukuran Indeks Tutupan Lahan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perbandingan Capaian realisasi IKLH Tahun 2019 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum dapat diukur dikarenakan tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak melakukan penghitungan IKLH hanya saja melakukan pemantauan terhadap lingkungan hidup dengan cara menghitung jumlah, dimana setiap tahunnya untuk jumlah komponen penghitungan IKLH berbeda berdasarkan sumber data analisis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

SS 4 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat



Pada sasaran ke 4 (empat) mempunyai 1 (Satu) indikator utama Indikator dengan capaian kinerja sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021
		2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Pengeluaran Per Kapita / Tahun	3.757.118	4.852.567	9.650.000	9.656.500	100%	10.250.000
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber : Dinas Perikanan, Pertanian, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Perhubungan



Capaian Terhadap Target dan Realisasi

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka - angka konsumsi / pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pendataan pengeluaran per kapita kepada pelaku usaha ikan telah memenuhi target, dengan capaian kinerja 100% atau realisasi sebesar 9.656.500 dari target capaian sebesar 9.650.000 dalam pendataan pengeluaran per kapita ini cukup sulit dilaksanakan secara riil, dikarenakan responden sering lupa berapa total keseluruhan yang dikeluarkan dalam sebulan, sehingga pendata cukup sulit untuk menghitung riil pengeluaran sebenarnya.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diterangkan bahwa pada Tahun 2019 konsumsi makanan lebih besar dari konsumsi non makanan, hal ini sesuai dengan pada umumnya bahwa di negara berkembang, pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Perbandingan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Tahun Lalu

Capaian pengeluaran perkapita pelaku usaha perikanan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 46,09% atau sebesar 9.656.500 dari 4.852.567 pada Tahun 2018, kenaikan pengeluaran perkapita pada Tahun 2019 ini dimungkinkan dikarenakan terjadinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum, selain itu bantuan pemerintah melalui Dinas Perikanan bisa juga memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha perikanan.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penghitungan pengeluaran perkapita masyarakat pelaku usaha perikanan adalah :

- a. Responden yang dijadikan sample sering lupa berapa pengeluaran riil yang dikeluarkan dalam sebulan.

- b. Masih kurangnya jumlah pendata
- c. Isu privasi yang muncul pada masyarakat, sehingga responden tidak selalu terbuka dengan yang ditanyakan pendata.

Solusi dan saran

- a. Bagi pendata, pendata harus pandai dalam mengolah pertanyaan kepada responden
- b. Bagi responden, sebisa mungkin untuk menghilangkan isu privasi, dikarenakan pendataan ini sangat penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran

SS 5 Meningkatkan Kualitas Tatanan Kehidupan Bermasyarakat



Pada sasaran ke 5 (Lima) Meningkatnya kualitas tatanan kehidupan bermasyarakat memiliki 1 (satu) indikator utama yaitu seperti penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021
		2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Tidak terjadi konflik antar umat beragama atau suku (Zero conflict)			0	0	0	0
	1. Persentase atau Pelanggaran Perda yang diselesaikan dan Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	3 kali	3 kali	6 kali	1 kali	67%	6 kali
	2. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi dan Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis	90%	95%	100%	95%	95%	100%
	3. Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan Siaga Lingkungan	80%	80%	85%	80%	85%	90%

Sumber :Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja agar tidak terjadi konflik antar umat beragama atau suku (*Zero conflict*) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan langkah-langkah preventif yaitu melakukan kegiatan penindakan pelanggaran perda dan Penyakit Masyarakat, penanganan angka kriminalitas dan demo tanpa anarkis dengan jumlah petugas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan dan Solusi :

- a. Banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban dengan datang dan mengadu nasib dengan berbagai kegiatan seperti Berdagang dan Buruh Harian Lepas dan lain sebagainya yang meresahkan ketertiban dan kenyamanan di masyarakat sehingga berbagai persoalan muncul seperti timbulnya penyakit masyarakat (Pekat);
- b. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum tetap menjadi kendala pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat karena masyarakat sering tidak mautahu atau tidak peduli dengan tugas - tugas yang diemban Polisi Pamong Praja;
- c. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi, mengundang masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya, namun hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dilakukan diluar - luar aturan yang telah ada misalnya seorang pelajar memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orangtua setiap pelajar;
- d. Banyak bermunculan pedagang - pedagang kaki lima dan mereka memanfaatkan fasilitas - fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi fasilitas umum itu sendiri;
- e. Terdapatnya masyarakat dan anak-anak yang sudah putus sekolah memanfaatkan waktu sehari-hari dengan cara penyalahgunaan obat berupa Lem; dan
- f. Banyak bermunculan anak-anak funk.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a. Sarana dan prasarana belum menunjang;
- b. Terjadi pelanggaran oleh pedagang kaki lima atau pedagang musiman;
- c. Terdapatnya cafe-cafe yang masih berjalan aktif diluar jam yang telah ditentukan; dan
- d. Anggaran yang belum memadai.

Alternatif Pemecahan Masalah

Adapun strategis pemecahan masalah untuk dilaksanakan selama 5 tahun dan untuk kedepannya adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dan akan di Sosialisasikannya Perda Kab.Tanjab Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban



Umum, Perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan kegiatan seperti sebagai berikut :

1. Pelaksanan razia Pekat dengan bekerja sama dengan TNI dan POLRI;
2. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018;
3. Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat;
4. Penertiban Pedagang dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan, dan tindakan penertiban;
5. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakain Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab.Tanjab Barat;
6. Penertiban penyakit orang gila dan dibawa serta di serahkan kepada Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat; dan
7. Melakukan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti sekalipun dirasakan belum optimal dalam rangka pencapaian kinerja terhadap indikator kelima dari sasaran strategis yakni tidak terjadinya konflik antar umat beragama atau suku sehingga menjadi *Zero Conflict*. Hambatan dan Permasalahan tersebut dikarenakan Besaran dan Struktur Organisasi dengan beban tugas yang besar belum didukung dengan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

SS 6

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik



Dari sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2019**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2021
		2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	55,75	44,65	80,08%	61,50
Rata-rata capaian kinerja							

Sumber : Pengawasan, Pelayanan Publik/ Perizinan, Perencanaan, Kepegawaian/SDM, Kelembagaan, Peraturan perundang – undangangan.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Indonesia dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Indonesia 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Melalui pedoman tersebut instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten / Kota mulai menerapkan secara bertahap reformasi birokrasi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua usaha dan kerja keras tersebut tidak lain adalah untuk membawa birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Target Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 yakni 55,75 dengan capaian kinerja sebesar 80,08% dari realisasi capaian sebesar 44,65, dari capaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,08% dari target yang ingin dicapai sudah menunjukkan capaian yang sangat maksimal, dimana penilaian mandiri reformasi birokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 ini merupakan tahun pertama pelaporan pada periode RPJMD 2016-2021, hanya sedikit kendala yang ditemui yaitu masih ada OPD yang belum memenuhi data sesuai dengan komponen penilaian.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Capaian kinerja anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dari jumlah serapan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan



strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan, namun dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrument dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala daerah.

Realisasi Belanja

Untuk belanja daerah, alokasi dana yang dianggarkan pada tahun APBD 2019 adalah dengan adanya pengurangan penerimaan, maka komposisi anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan menjadi 1.851.596.854.087,00- dengan komposisi belanja tidak langsung 737.944.990.917,00-(90,85%) dan belanja langsung 1.113.651.863.170,00-(92,66%) dengan realisasi (Data Sementara Non Audit Akhir Desember 2019) atas pagu anggaran APBD Perubahan tergambar dalam tabel:

**Tabel 10. Jumlah dan Realisasi Belanja APBD (Perubahan) Kab.Tanjab Barat (Data Sementara Non Audit Keadaan Akhir Desember 2019)**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	Sisa Anggaran	%
BELANJA	1.851.596.854.087,00	1.702.313.253.241,04	149.283.600.845,96	91,94
BELANJA TIDAK LANGSUNG	737.944.990.917,00	670.451.816.610,91	67.493.174.306,09	90,85
Belanja Pegawai	492.768.216.596,00	427.158.692.501,91	65.609.524.094,09	86,69
Belanja Subsidi	6.137.871.564,00	6.137.871.564,00	212,00	100
Belanja Hibah	10.553.532.840,00	9.488.382.840,00	1.065.150.000,00	89,91
Belanja Bantuan Sosial	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	17.500.000,00	99,04
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.263.852.560,00	3.262.852.560,00	1.000.000,00	99,97
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota /Pemerintahan Desa dan Partai Politik	222.601.517.357,00	222.601.517.357,00	-	99,97
Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-
BELANJA LANGSUNG	1.113.651.863.170,00	1.031.861.436.630,13	81.790.426.539,87	96,38
Belanja Pegawai	60.154.477.500,00	57.979.843.547,96	2.174.633.952,04	96,38
Belanja Barang dan Jasa	307.339.103.347,00	276.764.537.463,44	30.574.565.883,56	90,05
Belanja Modal	746.158.282.323,00	697.117.055.618,73	49.041.226.704,27	93,43

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / dan Pemerintahan Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota / Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta belanja tidak terduga. Tahun 2019 belanja tidak



langsung dianggarkan sebesar **Rp. 737.944.990.917,00,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 670.451.816.610,91** atau 90,85% lebih rendah dari rencana anggaran (*un audit*).

Belanja Pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai yang ditargetkan sebesar **Rp. 492.768.216.596,00,-** pada tahun 2019 terealisasi sebesar **Rp. 427.158.692.501,91,-** (86,69%) dari jumlah anggaran. Belanja subsidi tahun 2019 dianggarkan sebesar **Rp.6.137.871.564,00,-** terealisasi sebesar **Rp. 6.137.871.564,00,-** atau 100%. Belanja Hibah dianggarkan sebesar **Rp. 10.553.532.840,00,-** realisasi sebesar **Rp.9.488.382.840,00,-** atau 89,91%.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah menganggarkan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 3.263.852.560,00,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.262.852.560,00,-** atau 99,97%.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Tahun 2019 sebesar **Rp. 222.601.517.357,00,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 222.601.517.357,00,-** atau 99,97%.

Anggaran belanja tidak terduga pada Tahun 2019 disediakan anggaran sebesar **Rp.800.000.000,00,-** dan terealisasi sebesar **Rp.-** atau - . Hal ini disebabkan penggunaan belanja ini dilakukan sangat selektif sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Belanja Langsung

Komponen utama belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang merupakan cerminan pelaksanaan kebijakan program pembangunan tahunan dan tertuang dalam APBD yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam Tahun 2019 belanja langsung yang dianggarkan sebesar **Rp.1.113.651.863.170,00,-** dan terealisasi sebesar **Rp.1.031.861.436.630,13-** atau 96,38%.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Sasaran yang berjumlah 6 (Enam) sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan Sangat Berhasil, Berhasil dan Cukup Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, dan untuk memberikan gambaran tentang kinerja pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2019, menjabarkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, serta mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada *Stakeholder*.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 direkomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dan melengkapinya dengan indikator kinerja yang relevan, baik untuk tujuan maupun sasaran yang akan diwujudkan serta target – target kinerja jangka menengah agar pada akhir periode RPJMD dan Renstra dapat disimpulkan keberhasilan dan prestasi yang dapat dicapai selama periode tersebut.
2. Melakukan pemantauan Rencana Aksi atas kinerja. Hal ini penting agar kinerja yang telah diperjanjikan dapat dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dapat dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan serta untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
3. Melakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam upaya peningkatan kualitas indikator agar lebih relevan dan cukup untuk mempresentasikan kinerja atau kondisi yang ingin diwujudkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dan dikembangkan menggunakan teknologi informasi, serta memastikan dimanfaatkannya IKU dalam proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat



eselon IV keatas agar dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai program dasar pemberian) *reward & punishment*.

4. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan OPD dalam hal analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan pemanfaatan informasi yang disajikan dalam perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan program dan kegiatan informasi.
5. Agar meningkatkan inisiatif dalam pemberantasan korupsi supaya tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap hasil evaluasi pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun lalu adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan rapat oleh pimpinan bersama tim SAKIP Kabupaten dalam rangka langkah – langkah apa yang akan dilaksanakan untuk perbaikan peningkatan kinerja 2020 pada tanggal 17 Februari 2020 setelah hasil evaluasi SAKIP diterima pada tanggal 10 Februari 2020 di Kota Batam.
2. Reviu terhadap RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah secara kontinyu untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Hasil evaluasi LKjIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dimanfaatkan untuk memberikan *reward dan punishment* bagi OPD.
4. Realisasi atas penetapan kinerja maupun indikator kinerja utama tahun lalu dijadikan salah satu pertimbangan bagi Tim Anggaran untuk memberikan anggaran terhadap OPD yang bersangkutan.
5. Pengembangan e-SAKIP Tahun 2019 yang akan dilakukan secara sinergi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi KabupatenTanjung Jabung Barat.
6. Bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap rekomendasi hasil evaluasi pelaporan kinerja khususnya telah melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran program dan kegiatan yang tidak mendukung visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 sebesar Rp. 6.909.568.488 yang dilakukan pemangkasan terhadap 13 Program dan 38 kegiatan dari 12 OPD.

Akhirnya secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Tahun 2019 yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dipenuhi walau sepenuhnya belum sesuai harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan kami jadikan cambuk untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik lagi pada tahun mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal 36512

No Telp. (0742) 21238 Fax. (0742) 21238

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Tungkal, April 2020

Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ENCEP JARKASIH

Pembina Tk. I

NIP. 19701201 199009 1 001